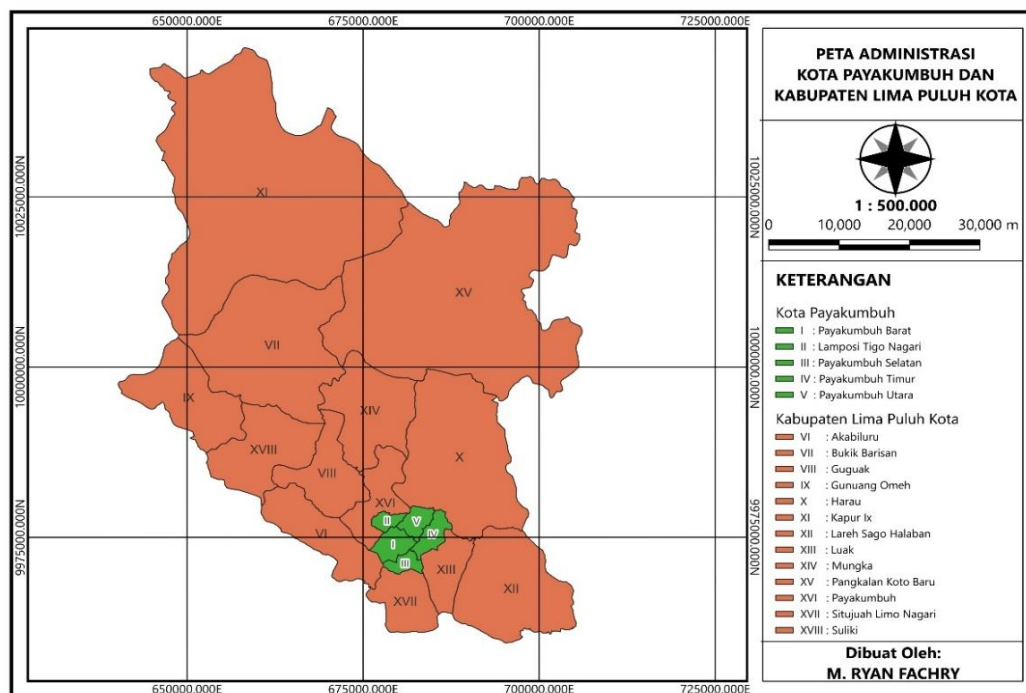


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan berbagai permasalahan transportasi seperti kemacetan, konsumsi energi yang tinggi, dan polusi udara (Zhang, Long, & Chen, 2019). Kondisi tersebut juga terjadi pada Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki keterkaitan erat dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Sebagai wilayah enklave yang berada di dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, sehingga pergerakan masyarakat antar kedua wilayah berlangsung cukup tinggi setiap harinya. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik kawasan aglomerasi, yaitu wilayah perkotaan yang berkembang secara menyatu tanpa dipengaruhi oleh batas administrasi, sehingga membentuk keterkaitan aktivitas dan mobilitas penduduk yang tinggi antar daerah (United Nations, 2019). Gambaran kedua wilayah ini ditampilkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini dilayani oleh angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Dari 11 trayek yang secara administratif menghubungkan kedua wilayah, hanya 7 trayek yang masih beroperasi, sedangkan 4 trayek lainnya tidak lagi terlayani (Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2025). Selain itu, seluruh angkutan yang masih beroperasi belum memiliki izin operasional resmi sehingga aspek legalitas, kelaikan jalan, dan keselamatan kendaraan belum terjamin. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kelaikan kendaraan yang dioperasikan. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2015).

Kinerja angkutan kota di Kota Payakumbuh saat ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan RDTR Kota Payakumbuh Tahun 2018–2038, direncanakan beberapa lintasan angkutan umum untuk mendukung mobilitas perkotaan (Pemerintah Kota Payakumbuh, 2018). Namun pada kondisi eksisting tahun 2026, hanya satu lintasan yang masih beroperasi, yaitu Jalur Soekarno Hatta – Tan Malaka melalui Veteran. Selain itu, operasional angkutan pada lintasan tersebut juga tidak ada perizinan resmi serta kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi penumpang. Di sisi lain, keberadaan Terminal Tipe B Koto Nan IV sebagai salah satu simpul transportasi utama di Kota Payakumbuh belum berfungsi secara optimal. Rendahnya tingkat pemanfaatan terminal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya angkutan umum AKDP maupun angkutan kota yang masuk dan beroperasi di kawasan terminal.

Kondisi angkutan perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini tergolong lebih memprihatinkan. Hingga saat ini, belum terdapat penetapan trayek resmi untuk layanan angkutan pedesaan, sehingga masyarakat lebih bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan AKDP. Dari sisi prasarana, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki dua terminal tipe C, yaitu Terminal Limbonang dan Terminal Rimbo Data, namun keduanya tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai simpul transportasi. Kondisi ini

terlihat dari tidak adanya aktivitas di kawasan terminal, serta kondisi fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya peran terminal dalam mendukung sistem transportasi daerah menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota turut berkaitan dengan tingginya volume lalu lintas pada ruas jalan utama di antara kedua wilayah tersebut. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada Jalan Raya Payakumbuh–Tanjung Pati mencapai 13.675 satuan mobil penumpang (smp)/hari, sedangkan pada Jalan Raya Payakumbuh–Suliki tercatat sebesar 14.304 smp/hari (Tim PKL Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023).

Permasalahan tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih bergantung pada kendaraan pribadi, yang dalam jangka panjang dapat memperbesar persoalan transportasi, seperti kemacetan, peningkatan konsumsi energi, dan penurunan kualitas lingkungan (Zhang et al., 2019). Dalam penyelenggaraannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 138 (Republik Indonesia, 2009). Arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mencakup pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, serta angkutan perintis di daerah terpencil (Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2021). Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan rute layanan angkutan massal berbasis jalan yang berkelanjutan dan mampu melayani pergerakan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pelayanan angkutan umum dan kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan penelitian terkait penyusunan rute angkutan aglomerasi. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana pola pergerakan masyarakat dalam kawasan aglomerasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana sebaran pusat wilayah kajian sebagai dasar penentuan rute angkutan?
3. Bagaimana potensi permintaan perjalanan (demand potensial) masyarakat pada kawasan aglomerasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota?
4. Bagaimana perencanaan rute angkutan aglomerasi yang optimal berdasarkan hasil analisis pola pergerakan, pusat aktivitas, dan potensi permintaan perjalanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan yang berkaitan dengan perencanaan rute angkutan aglomerasi, yaitu :

1. Mengidentifikasi pola pergerakan orang dalam kawasan aglomerasi Payakumbuh – Lima Puluh Kota.
2. Menganalisis sebaran pusat aktivitas sebagai dasar dalam penentuan rute angkutan aglomerasi.
3. Menganalisis potensi permintaan perjalanan (demand potensial) pada kawasan aglomerasi.
4. Menganalisis rencana penentuan rute angkutan aglomerasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan implementasi rencana strategis pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertimbangkan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah

satu bahan pendukung dalam pengembangan pelayanan angkutan umum dan penyusunan rencana transportasi yang berkaitan dengan kebutuhan pergerakan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Selain memberikan manfaat dalam aspek perencanaan transportasi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas perencanaan transportasi perkotaan, pola pergerakan masyarakat, maupun pengembangan sistem angkutan umum pada kawasan aglomerasi.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Lokasi studi mencakup seluruh wilayah Kota Payakumbuh dan wilayah tertentu di Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk kawasan penyangga berdasarkan karakteristik interaksi dan pergerakan transportasi memiliki keterkaitan dengan Kota Payakumbuh.
2. Kajian mengenai sistem pengoperasian angkutan umum massal dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Penentuan pola pergerakan dan jumlah permintaan angkutan umum kawasan aglomerasi
 - b. Rute operasi angkutan umum Kawasan aglomerasi sesuai dengan pertimbangan kebutuhan perjalanan masyarakat dan pertimbangan pusat aktivitas di kawasan aglomerasi.
3. Dalam penelitian tidak mengkaji tentang rencana kinerja operasional angkutan umum

Penelitian ini juga tidak membahas mengenai biaya operasional kendaraan